

Bencana, Informasi dan Keterlibatan Media

*Nunung Prajarto**

Abstract

This article describes the role and involvement of media in reporting disaster. Media involvement in giving people information on disaster should be based on human safety, security and dignity. This paper suggests that media report on pre, during and after a disaster should consider human values at the first priority.

Kata-kata kunci: *bencana; peranan media; informasi bencana; keterlibatan media.*

Pendahuluan

Kisah hebat bencana tak lepas dari kisah hebat pekerja media kepada dunia terhadap bencana yang terjadi. Gempa bumi dan tsunami 26 Desember 2004, sebagai contoh, masih menyisakan ilustrasi hidup kejadian demi kejadian yang terekam dan kemudian disebarkan media. Heroisme media dan pekerjaannya tak berhenti pada pelaksanaan tugas jurnalistik standar yang harus dilakukan. Dalam laporan Park dan Jensen (2005) untuk *the International Federation of Journalists' Asia Pacific Office* disebutkan, beban berat jurnalis pada waktu terjadinya bencana mencakup tugas peliputan dengan tuntutan akurasi, profesionalisme serta etika dan sekaligus upaya untuk memikirkan keamanan diri dan jiwanya dalam situasi yang bisa menghadirkan trauma. Keterlibatan media juga meluas dalam posisinya sebagai pelapor peristiwa dengan penggalangan bantuan, penyaluran bantuan baik langsung maupun

**Nunung Prajarto, PhD* adalah Staf Pengajar Ilmu Komunikasi dan Ketua Program Pasca Sarjana Ilmu Komunikasi, FISIPOL UGM, Yogyakarta. Ia bisa dihubungi melalui e-mail: yanpraz@yahoo.com

tidak langsung serta memonitor transparansi dan upaya agar terbebas dari pengorupan bantuan.

Peran yang demikian menempatkan media pada posisi penting dan strategis. Di Rusia, selain dipercaya memiliki kemampuan mengomunikasikan informasi secara obyektif, seperti dikatakan Presiden Putin dan Menteri Media Mikhael Lesin, media diharapkan mampu menciptakan ruang tunggal informasi dan menyatukan negara. Namun harus diingat bahwa pernyataan mereka itu berada dalam atmosfer media di Rusia yang masih dibalut oleh kepercayaan rakyat pada media yang dikuasai pemerintah dan mayoritas rakyatnya pun masih menghendaki atau mengijinkan dilakukannya sensor pada media (Simons, 2005: 2 dan 19). Dengan ruang kebebasan yang bisa jadi berbeda antarnegara, peran strategis media bisa ditempatkan pada rentang posisinya yang terikat, semi-independen dan benar-benar independen. Satu hal yang tak bisa dipungkiri, media memiliki posisi tertentu di suatu negara, dan dalam kaitannya dengan bencana, posisi itu tetap berhubungan dengan tugas peliputan, aktivitas kemanusiaan dan sarana untuk mengurangi dan meniadakan penderitaan.

Antusiasme media yang terpotret dari aktivitas media dalam peristiwa bencana, di sisi lain, menyeret pada kesalahkaprahan dalam mengantisipasi bencana. Pada titik ini, di satu sisi, sistem informasi bencana berusaha diteguhkan dan media diposisikan menjadi bagian dari sistem informasi bencana. Di sisi yang lain, media informasi yang terkait dengan bencana dinaikpangkatkan menjadi sistem informasi bencana. Akibatnya justru memunculkan kebingungan publik terhadap sistem informasi bencana itu sendiri. Alih-alih mendapatkan informasi yang terintegrasi dalam suatu sistem informasi bencana yang utuh, publik justru hanya akan mendapatkan kumpulan potongan-potongan informasi tentang bencana. Kesatuan

pandangan dan reaksi terhadap bencana yang telah, sedang dan akan terjadi tentunya tidak akan bisa diperoleh dengan hal itu.

Tulisan di bawah ini akan mengurai potensi media massa dalam menyikapi bencana. Dasar uraian diobservasi dari rangkaian sistem informasi dan sebaran media informasi tentang bencana. Studi dengan cara ini pada dasarnya merupakan bagian dari proses kompilasi, komparasi dan analisis untuk media informasi bencana. Dari kajian yang dilakukan didapati peran yang bisa diambil alih dan diemban media massa sehingga penanganan bencana benar-benar lebih dapat memperlihatkan keterlibatan media.

Penanganan Informasi Bencana

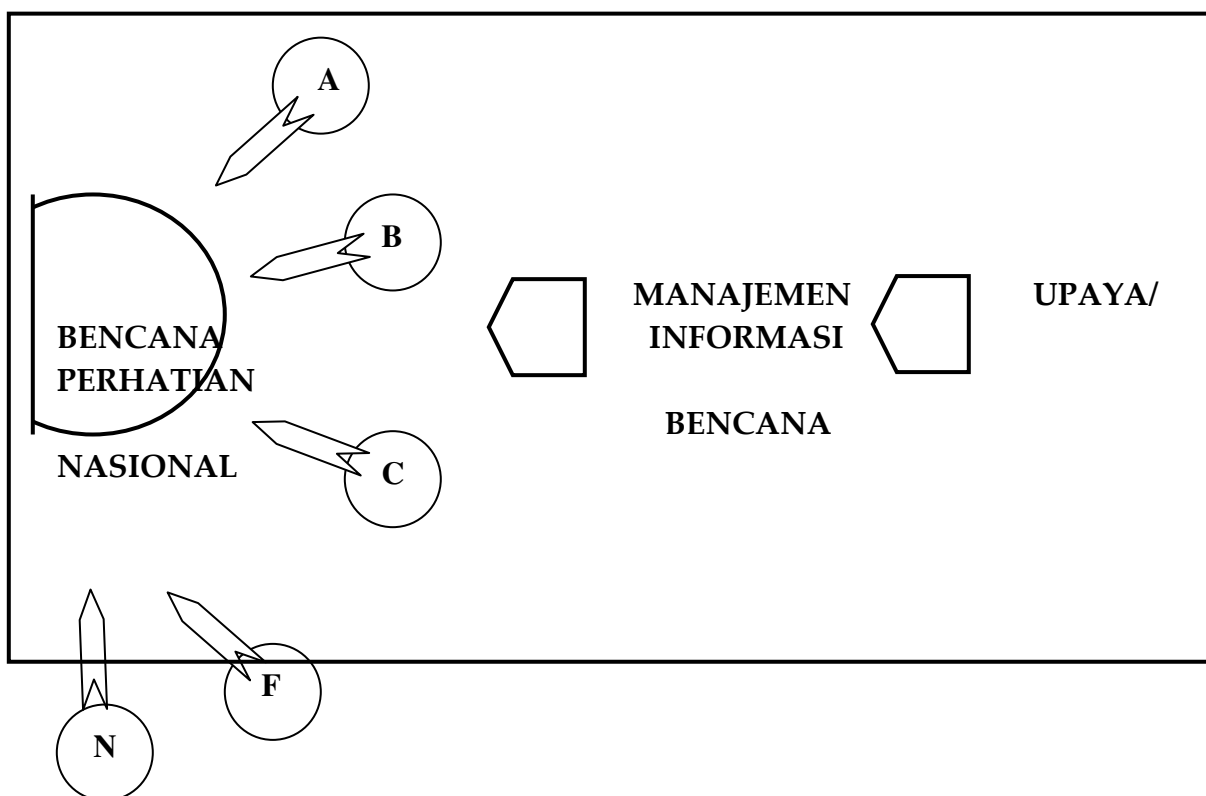
Selain kabar tentang bencana yang terjadi, terdapat banyak informasi berisi petunjuk yang memungkinkan orang untuk mengambil sikap paling tepat dalam menyongsong, menghadapi dan menyikapi bencana. Sebagai contoh, American Bar Association – State and Local Government Law Section (2003: 4-16) menyediakan suatu *checklist* sebagai acuan bagi petugas dalam menghadapi suatu bencana yang berpeluang terjadi. *Checklist* ini dilengkapi dengan berbagai pertimbangan tentang isu, kebijakan, peraturan, aktor-aktor yang bisa dirujuk dan koordinasi antarlembaga. Institusi lain menyajikan informasi tentang nasihat dan langkah-langkah yang bisa dilakukan bila bencana terjadi serta sesaat setelah bencana terjadi, termasuk perlunya mengembangkan *media relations* (National Emergency Management Association, 2003). Semua informasi ini pada dasarnya memerhatikan masalah keselamatan, kesehatan dan keamanan masyarakat.

Penentuan kategori bencana tentunya berbeda antarnegara dan bahkan antardaerah dalam suatu negara. Sebagai contoh, secara umum dikenal jenis-jenis bencana seperti kekeringan, gempa bumi, epidemi, temperatur ekstrim,

banjir, tanah longsor, gelombang laut (termasuk tsunami), kebakaran dan angin ribut. Di suatu negara tertentu, epidemi yang terjadi berkemungkinan dipilah-pilah kembali dalam kelas-kelas seperti demam berdarah dan flu burung. Contoh lain, kategori bencana banjir terpilah lebih rinci yang di antaranya menjadi banjir luapan air sungai, banjir karena *mis-management* luapan air hujan dan banjir karena luapan air dari *unpredicted cases*. Inti dari beda dasar penentuan kategori bencana ini adalah adanya beda tentang informasi bencana, yang berlanjut pada beda untuk manajemen informasi bencana dan beda strategi nasional untuk penanganan bencana, tanpa harus terjebak pada mimpi besar tentang upaya menciptakan sistem informasi bencana. Harus diingat bahwa bila suatu sistem informasi bencana diciptakan, maka sistem ini tidak saja sekadar menjadi sistem yang hanya terkait dengan bencana alam, namun harus pula mampu mewadahi bencana kemanusiaan lainnya seperti terorisme, pelanggaran hak asasi manusia dan bahkan kejahatan (Perl, 2006: 15-16; dan ASIS International Disaster Management Council, 2003: 29-32).

Hingga sejauh ini, informasi yang dijumpai lebih banyak tentang bencana sebagai sebuah kejadian. Informasi tentang penanganan bencana dan petuah preventif bencana pun masih hadir sebagai informasi yang terpisah-pisah per kejadian, meskipun telah muncul pula upaya untuk menyatukannya dalam suatu manajemen informasi bencana terintegrasi sebagai bagian dari suatu strategi nasional dalam menangani bencana. Konsekuensinya, hal yang demikian perlu dicermati secara lebih teliti. Seperti terlihat pada Gambar 1, informasi dari institusi A, B, C hingga ke institusi N, misalnya, lebih tepat digambarkan sebagai informasi yang mengerubungi bencana. Informasi mereka masih terkategori dan bersifat reaktif meskipun dinyatakan berdasar nalar, berkaca pada bencana sejenis, diadopsi dari nasihat-nasihat lembaga lain dan mengarah pada tujuan demi kesehatan, keamanan dan keselamatan

masyarakat. Isi informasi mereka pun bisa jadi terpenggal untuk suatu jenis bencana tertentu yang bisa jadi tidak tepat untuk jenis bencana yang lain. Cara penyampaian informasi, lebih jauh lagi, juga tidak bisa digolongkan dalam proses komunikasi yang efektif. Namun demikian, semua ini tidak menutup diri dari kenyataan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh masing-masing institusi dengan ragam cara pengomunikasiannya telah memberi kontribusi bagi masyarakat dalam menghadapi bencana. Lebih tepatnya, informasi yang mereka hadirkan dapat dijadikan alternatif dalam distribusi informasi bencana dan penanganannya.



Gambar 1. Peta Informasi Bencana

Hal yang kemudian berusaha dimanfaatkan dari ragam informasi alternatif di atas muncul dalam upaya manajerial informasi bencana. Pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah daerah atau lembaga lain yang berinisiatif untuk menyatukan langkah dalam pemberian informasi kepada masyarakat tentang bencana sebagai suatu kejadian, penanganan bencana yang terjadi dan upaya pengenalan atau peringatan. Kerap dijumpai, pemerintah daerah atau lembaga-lembaga itu pun selanjutnya memberi masukan kepada pemerintah pusat tentang manajemen informasi bencana beserta kelengkapan informasi yang relevan dalam penanganan bencana. Pada level ini, segala upaya yang terkait dengan distribusi informasi dan aksi-aksi kerelawanan mereka harus diterima sebagai suatu hal yang positif dan dapat dirasakan manfaatnya.

Contoh-contoh berikut, yang dikeluarkan oleh sejumlah institusi, menunjukkan fungsi dan kredit positif terhadap upaya membantu masyarakat dan pihak lain dalam suatu bencana yang terjadi (Light Foundation & Volunteer Center National Network, 2002: 14-16). Informasi tentang ini biasanya mencakup masalah mitigasi, kesiapan, tanggapan dan perbaikan. Instruksi-instruksi dalam mitigasi di antaranya berkait dengan hal identifikasi dan diseminasi informasi secara mudah dan murah tentang kemampuan diri sendiri dalam menghadapi bencana, penyiapan fasilitas untuk meringankan penderitaan korban dan instalasi peringatan dini. Masalah kesiapan biasanya dikaitkan dengan informasi tentang keterlibatan latihan bencana, pengayaan pengetahuan dan kesadaran individual dengan manajemen bencana dan pengumpulan informasi untuk penanganan awal. Tingkat tanggapan mencakup segala informasi yang harus segera dituruti dan dilakukan bila bencana terjadi, termasuk dalam hal pertolongan langsung, dukungan moral untuk korban, sikap tanggap untuk melihat kondisi keluarga atau tetangga dan

upaya mengumpulkan dana jangka pendek dan jangka menengah. Sedangkan tahap rekoveri mencakup pengorganisasian bantuan, perbaikan serta pembangunan fasilitas sementara, semi-permanen dan baru atau permanent.

Checklist untuk pertimbangan utama dalam menghadapi atau menangani suatu bencana mencakup beberapa hal yang harus dijawab secara tepat (ASIS International Disaster Management Council, 2003: 7-24). Hal-hal itu adalah pengaturan dan kontrol, komunikasi, tanda dan peringatan, fasilitas, evakuasi, lokasi aman sementara, layanan darurat, layanan khusus (keamanan, kebakaran, kesehatan), informasi darurat, administrasi dan logistik dan rancangan rekoveri. ASIS juga menyarankan agar penanganan informasi bencana berisi tentang saran melakukan persiapan sesegera mungkin, mengurangi hal-hal yang mungkin dapat mendatangkan bahaya serta penyiapan upaya perlindungan. Perlakuan terhadap *checklist* seperti ini seharusnya hanya menyediakan jawaban untuk “ya”, “tidak” dan “tidak perlu”, sedangkan jawaban “tidak diketahui” merupakan jawaban yang mutlak tidak bisa diterima.

Hal-hal di atas menggambarkan dua hal. Pertama, informasi penanganan bencana yang menyangkut berbagai informasi bila bencana akan, sedang dan telah terjadi. Kedua, penanganan informasi bencana yang seharusnya merupakan refleksi dari aplikasi manajerial terhadap informasi dari hasil suatu perencanaan komunikasi dalam masalah bencana. Permasalahan besar muncul, seperti disampaikan pada awal tulisan, manakala penanganan informasi yang dilakukan oleh masing-masing penyusun informasi dinaikkelaskan menjadi suatu sistem informasi. Kekacauan pengertian akan berjumpalitan antara informasi, manajemen informasi dan sistem informasi. Pendistribusian informasi sederhana pun bahkan ada yang dilakukan dengan klaim sebagai suatu sistem informasi. Dengan kata lain, sangatlah kurang layak

bila segala macam publikasi tentang langkah-langkah dalam menghadapi bencana dilabeli dengan sistem informasi bencana. Akan lebih tepat bila hal-hal itu berada pada batas atau tataran informasi sebagai bagian dari manajemen informasi tentang bencana.

Tiga pertimbangan melandasi hal ini. Pertama, informasi geologis dan geografis beserta historis kebumihan tidak dipungkiri merupakan suatu hal yang penting, layak dan perlu dikomunikasikan kepada masyarakat. Namun demikian, dasar dari hal ini adalah pesan yang sengaja disusun untuk dikomunikasikan ke masyarakat dan sama sekali bukan merupakan sistem informasi yang berdiri tunggal. Informasi yang demikian hanyalah sebagian kecil dari informasi yang mestinya diketahui masyarakat, sama halnya dengan informasi tentang potensi bahaya kejahatan dan ancaman teror. Tatanan atas informasi-informasi yang demikian kemudian perlu dikelola secara profesional sehingga bisa digunakan secara efektif oleh masyarakat, lembaga yang ditugaskan menangani bencana dan pemerintah.

Kedua, agen-agen atau lembaga yang menangani manajemen bencana dan keadaan darurat tertentu tidak boleh dipandang sebagai agen utama yang harus memimpin ragam manajemen untuk setiap bencana yang ada. Hal ini menjadi dasar kerja yang sudah dilakukan oleh National Emergency Management Association. (2003: 9). Artinya, agen-agen semacam ini hanya bertindak untuk mendukung operasi, logistik dan sumber serta dirancang untuk untuk menjamin keefektivan langkah pemerintah secara keseluruhan. Dengan demikian, manajemen informasi bencana bisa jadi dikelola oleh masing-masing departemen terkait (Departemen Kesehatan untuk masalah bencana kesehatan demam berdarah, sebagai contoh) yang secara operasional, logistik dan pengelolaan sumbernya didukung oleh agen atau lembaga ini dan

bukan agen atau lembaga ini yang “memaksakan” sistem yang harus diikuti oleh departemen terkait.

Ketiga, sistem informasi bencana pada hakikatnya harus mampu mewadahi dan menjadi acuan dari segala aksi yang diarahkan untuk merespon aneka bencana, baik bencana alam maupun bencana-bencana lain yang membahayakan keselamatan masyarakat. Pada tataran ini, pengoperasian manajemen bencana dan manajemen informasi bencana masing-masing departemen harus memiliki landasan kuat yang berjalan paralel dengan strategi nasional dalam penanganan bencana dan mudah dijadikan referensi bagi masyarakat lewat publikasi-publikasi yang ditujukan untuk mendukung kerja departemen. Dengan kata lain, masing-masing departemen harus mampu menerjemahkan strategi nasional penanganan bencana dan hasil terjemahannya mudah dikonsumsi sebagai informasi oleh masyarakat.

Tiga pertimbangan di atas sekaligus memudahkan pemahaman tentang posisi dan potensi media dalam menyebarkan informasi yang terkait dengan bencana. Secara ringkas dapat disebutkan, media massa dapat menjadi sarana persebaran informasi tentang bencana sebagai peristiwa serta informasi lain untuk meminimalkan korban akibat bencana yang terjadi. Selain itu media massa dapat bertindak sebagai agen pendukung operasional manajemen suatu departemen atau paling jauh sebagai rekan pemerintah dalam menghadapi bencana yang akan, sedang dan telah terjadi. Penanganan informasi bencana yang dilakukan media pun, pada kapasitas media sebagai sumber informasi, harus mengacu pada strategi nasional penanganan bencana karena ketidakakuratan informasi berpeluang menciptakan bencana baru dalam bencana yang tengah terjadi.¹

¹ Bandingkan dua *headlines* yang dikeluarkan dua surat kabar lokal di Yogyakarta tentang arah awan panas saat aktivitas Gunung Merapi meningkat di sekitar bulan April, Mei dan Juni 2006.

Besar kemampuan media dan cara media menyikapi bencana, lebih lanjut, menjadi menarik untuk ditilik. Pandangan dan aspirasi tentang keterlibatan media dalam suatu proses komunikasi yang berisi informasi bencana dapat dijustifikasi dari uraian selanjutnya dalam tulisan ini.

Informasi Bencana dan Media

Seberapa luas cakupan tentang bencana yang harus diketahui? Secara sederhana dan paling jamak dijumpai di Indonesia, pengetahuan tentang bencana tidak jauh dari gempa bumi (gempa bumi di Aceh 2005, di Sumatera Barat 2005 dan di Yogyakarta 2006, misalnya), letusan gunung berapi (gunung Krakatau, Merapi, Agung, sebagai contoh), angin kencang (dengan beragam sebutan seperti lesus, putting beliung dan cleret taun), banjir (di Jakarta dan kawasan rural lain di Indonesia) dan gelombang laut (tsunami Aceh dan Pangandaran, umpamanya) serta tanah longsor. Sangat jarang kiranya yang menyebut kebakaran hutan dan kelaparan adalah bencana. Akan lebih jarang lagi ditemui orang yang menyebut peperangan, konflik antaretnik, terorisme dan kejahatan sebagai bencana yang justru “diselenggarakan” oleh manusia. Tabrakan kereta api, pesawat jatuh dan kapal tenggelam pada umumnya disebut sebagai kecelakaan dan jarang, bahkan dituduh membesar-besarkan, bila menyebut hal-hal itu sebagai bencana dalam layanan jasa transportasi. Selain jebakan tentang kedekatan orang dengan peristiwa dalam memaknai bencana, jebakan lain biasanya terbaring pada *magnitude* korban yang diakibatkan oleh bencana itu.² Semakin sedikit jumlah korban, penamaan peristiwa itu sebagai bencana akan semakin kabur.

Tidak hanya di Indonesia, tenggelamnya kapal Titanic yang pada awalnya disebut sebagai bencana pun, dengan berjalannya waktu, telah beralih

² Tentunya, sistem informasi bencana tidak akan melakukan diskriminasi jumlah korban.

sebutan sekadar menjadi sebuah peristiwa yang pernah menjadi kontroversi dalam pemberitaan media (Heyer, 1995: 6-14).³ Media sendiri tidak bisa lari dari tuduhan pembingkaian (*framing*) bencana jatuhnya pesawat menjadi suatu kecelakaan, meskipun jumlah korban pesawat jatuh pada dekade 90-an memang hanya sepertiga dari jumlah korban meninggal akibat kasus lalu-lintas di darat (Cobb dan Primo, 2003: 2). Dalam kaitannya dengan hal ini, kontribusi media dalam sebaran informasi tentang bencana memang terlihat. Namun demikian, tilikan lebih jauh melalui *framing analysis* sebagai contoh, akan lebih dapat menunjukkan keasyikan media pada peristiwa bencana itu sendiri daripada peran dan kontribusi lain yang sesungguhnya layak pula dilakukan media.

Tiga diagram di bawah ini dapat dipakai sebagai dasar untuk melihat lebih jauh tentang informasi bencana dan media. Data diperoleh dari International Disaster Database untuk bencana alam tahun 2006 yang dibandingkan dengan bencana sejenis pada lima tahun sebelumnya (UN/ISDR dan CRED, 2007: 1-2). Data yang tersaji tidak memasukkan jenis bencana lain seperti bencana akibat peperangan dan terorisme.⁴

³ Korban kapal tenggelam ini diyakini lebih dari seribu penumpang, namun *the New York Sun* pernah muncul dengan *headline* bahwa seluruh penumpang berhasil diselamatkan.

⁴ Lebih lengkap tentang angka-angka yang terkait dengan bencana alam 2005 dapat dilihat pada:

<http://www.unisdr.org/eng/media-room/press-release/2007/2006-Disaster-in-number-CRED-ISDR.pdf>

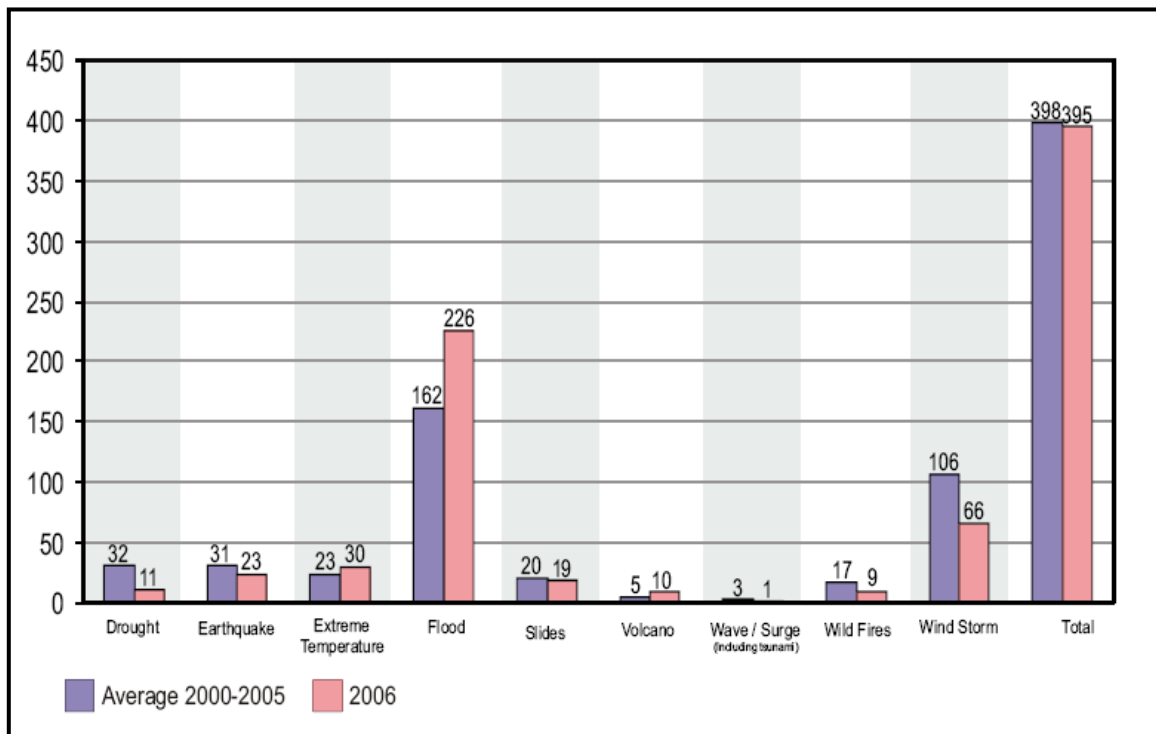


Diagram 1
Rata-rata Bencana Alam 2000-2005 dan Jumlah Bencana Alam 2006

Diagram 1 menunjukkan banjir sebagai bencana yang paling sering terjadi di dunia pada tahun 2006. Hal ini relatif sama dengan bencana yang terjadi pada lima tahun sebelumnya. Masalah baru terlihat ketika bencana banjir ini dilihat lebih jauh. Sepanjang tahun 2006, banjir yang terkategori bencana besar dengan 498 korban meninggal hanya terjadi di Ethiopia pada bulan Agustus. Pada tahun 2005, banjir sebagai bencana besar terjadi di Pakistan pada bulan Februari dengan 520 orang menjadi korban, di China pada bulan Juni dengan korban sebanyak 771 orang dan di pada bulan Juli di India dengan jumlah korban 1.200 orang. Angka-angka korban banjir ini praktis kalah dengan jumlah korban gempa bumi di Yogyakarta 27 Mei 2006 yang mencapai 5.778 manusia (dari total 5.890 korban gempa bumi tahun 2006) dan gempa bumi di Pakistan pada bulan Oktober 2005 dengan korban sebanyak

73.338 orang atau tsunami 26 Desember 2004 dengan jumlah korban ratusan ribu jiwa (untuk lebih lengkap tentang jumlah korban bencana alam tahun 2006 dan rata-rata jumlah korban dari tahun 2000 hingga 2005, lihat Diagram 2).

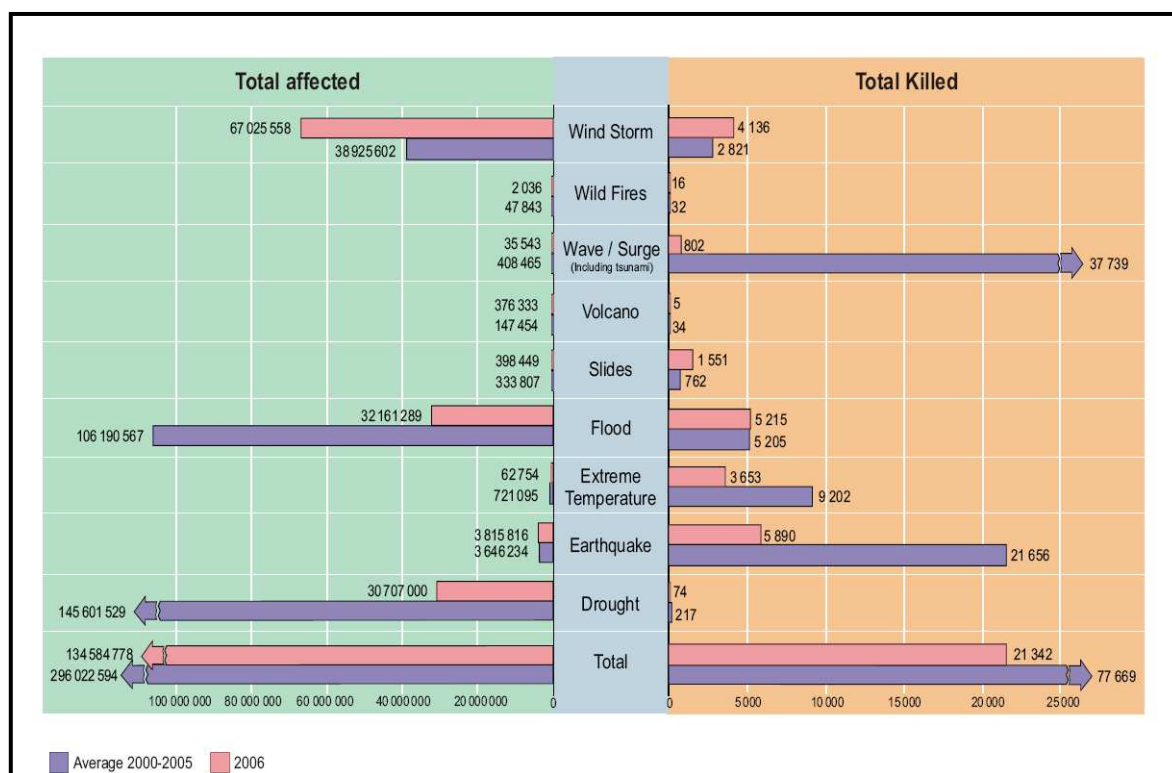


Diagram 2
Rata-rata Jumlah Korban Bencana Alam 2000-2005 dan Jumlah Korban 2006

Dengan berbagai pertimbangan tentang *news values*, *news worthiness* serta penerapan standar profesional jurnalistik, informasi tentang bencana yang disampaikan media massa dapatlah dimaklumi. Artinya, bahwa di Indonesia pemberitaan tentang banjir (yang jumlah bencananya paling banyak) tidak sesering dan seintens pemberitaan tentang gempa bumi bisa diterima lantaran gempa bumilah bencana yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia pada tahun 2006. Konsekuensinya, masyarakat Indonesia pun cenderung akan terbawa pada anggapan bahwa gempa bumi merupakan

bencana alam yang paling membahayakan jiwa mereka. Bahkan, pernyataan bahwa Indonesia adalah negara yang rawan dengan bencana alam dan penduduknya praktis “bersahabat” dengan bencana pun akan cenderung dikaitkan dengan gempa bumi. Pada sisi ini, kembali seperti telah diuraikan di depan, informasi tentang bencana yang diberikan kepada masyarakat dan kemudian manajemen informasi bencana yang berusaha dihadirkan ke masyarakat mencerminkan sikap reaktif terhadap bencana.

Akan menjadi lain bila, media massa mampu menghadirkan bencana sebagai peristiwa yang harus disikapi secara bersama oleh masyarakat di dunia. Bahwa gempa bumi merupakan bencana alam yang paling menakutkan di Indonesia, ini adalah fakta. Namun demikian, bahwa banjir merupakan bencana alam yang paling kerap terjadi pun layak untuk diinformasikan ke masyarakat. Penyikapan terhadap informasi tentang banjir bukan tidak mungkin akan menjadi bagian dari proses pembelajaran di dalam masyarakat untuk tidak menyepelkan masalah banjir, yang meskipun di Indonesia tidak terlalu banyak membawa korban jiwa, memiliki akibat ekonomi yang relatif sama dengan mati atau terhentinya aktivitas kehidupan ekonomi. Secara ekonomi, lihat Diagram 3, gempa bumi tahun 1980 di Italia dan 1985 di Jepang, dan badai Katrina, Rita dan Wilma di Amerika Serikat tahun 2005 merupakan peristiwa-peristiwa menonjol yang banyak menimbulkan kerugian, sama seperti banjir tahun 1998 di China

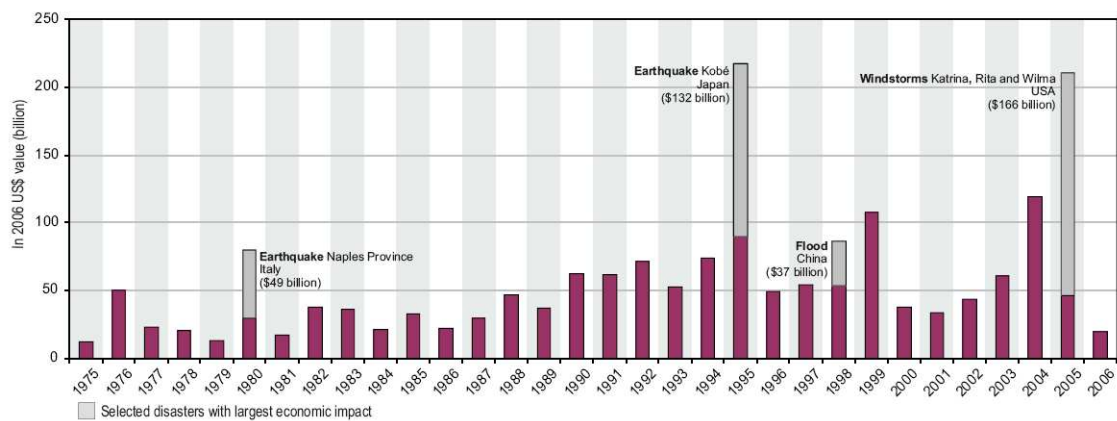


Diagram 3
Kerugian Akibat Bencana Alam 1975-2006

Hal yang sama akan sangat bermanfaat bila media massa mampu dan mau mengangkat jenis-jenis bencana lain yang tidak sekadar bencana alam. Dari jelajah informasi yang diberikan media massa, bukan tidak mungkin bila kesadaran masyarakat di Indonesia akan ancaman bencana menjadi lebih lengkap; bahwa bencana tidak saja gempa bumi, tetapi banjir pun sangatlah merugikan dan membahayakan; bahwa bencana tidak sekadar berasal dari alam yang sangat sulit diprediksi, tetapi juga bisa berupa bencana alam yang setidaknya dapat diperkirakan kedatangannya; bahwa bencana alam sama merugikannya dengan bencana lain yang justru datang dari kelalaian manusia; bahwa bencana, apa pun bentuk dan penyebabnya, membutuhkan penyikapan manusia dan semestinya bisa disikapi secara tepat; dan bahwa media massa semestinya dapat menjalankan peran dan mengisi keterlibatannya dengan lebih maksimal.

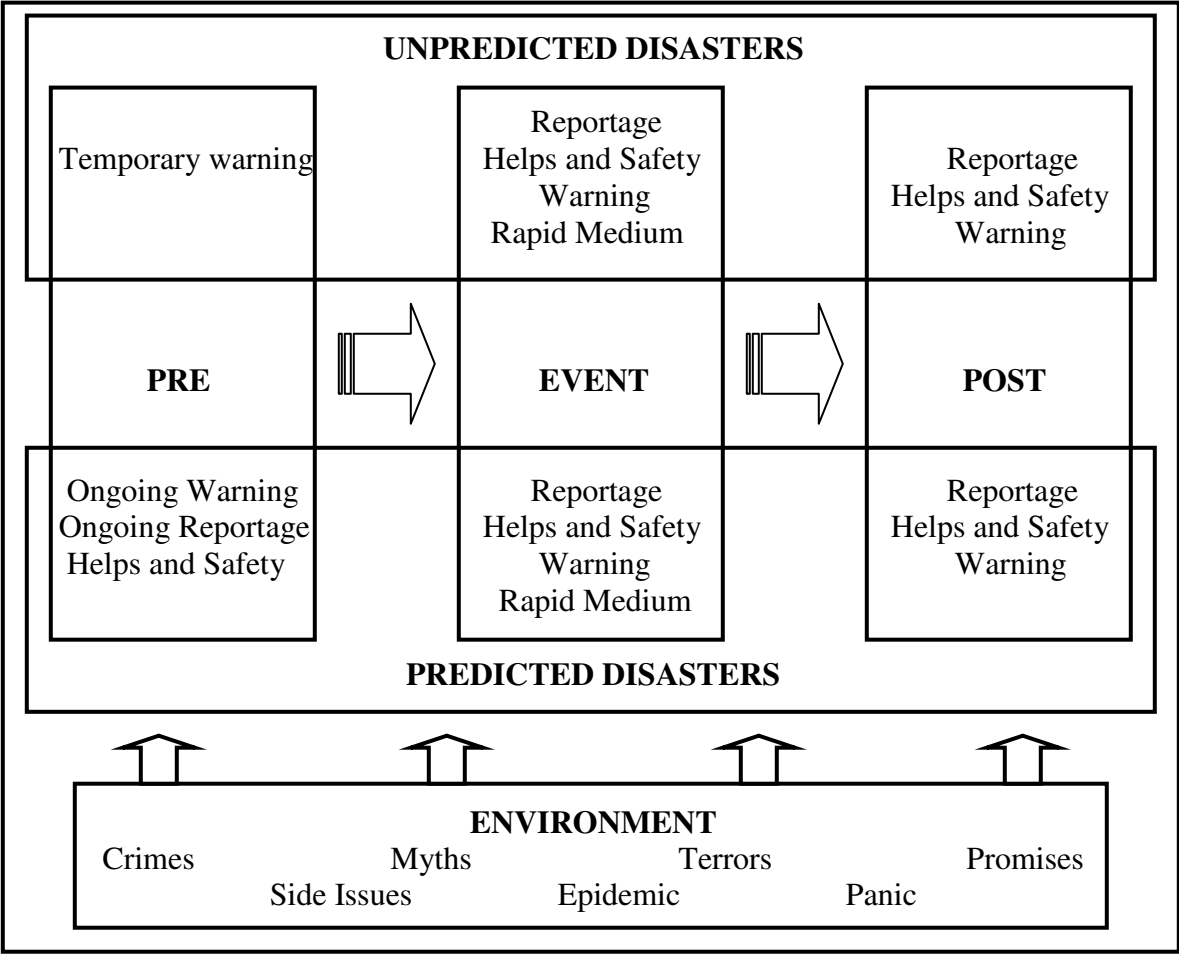
Sebaliknya, kegagalan dan keacuhan media terhadap hal-hal di atas berpotensi untuk menghadirkan bencana lain. Setidaknya, media massa justru dapat menambah beban penderitaan dan memperbesar kerugian akibat bencana. Cohl (1997: 16-22) mengingatkan tentang pesimisme, paranoia dan

sikap salah media yang justru cenderung membawa masyarakat masuk ke dalam suatu bencana. Hal yang sedikit berbeda disampaikan Ross (2003: 49) tentang peran media yang semestinya bisa dilakukan dalam usaha penyembuhan korban-korban terorisme dan kekerasan. Setidaknya, seperti yang diungkapkan Neuzil dan Kovarik (2005: 1-9), media massa dapat menempatkan diri secara benar bila terjadi kontroversi dan pertentangan dalam suatu bencana.

Posisi media lebih lengkap dalam suatu bencana kiranya dapat dilihat pada tahapan bencana seperti tersaji pada Gambar 2. Garis bawah dalam hal ini harus diberikan pada keselamatan dan keamanan manusia secara umum sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas dan pengisian keterlibatan media.

Pekerja media tentu dapat menggunakan kebijakan personal dan institusionalnya dalam menyikapi bencana yang terjadi, baik bencana yang tidak bisa diduga terjadinya (seperti gempa bumi dan tanah longsor) maupun bencana yang bisa diikuti perkembangannya dan dapat diperkirakan terjadinya (letusan gunung berapi dan kekeringan, sebagai contoh). Inti dari keterlibatan media dan pekerja-pekerjanya terdapat pada masalah pemberian informasi yang bersifat mengingatkan, pemberian informasi yang berujud laporan dan perkembangan peristiwa dan tindakan atau aksi langsung maupun tidak langsung dalam pemberian bantuan guna menyelamatkan manusia, mengurangi jumlah korban, meringankan penderitaan korban serta mengurangi kerugian lain yang bisa ditimbulkan. Bentuk-bentuk keterlibatan itu bisa diterjemahkan dalam aneka format informasi dan berita yang disajikan media, ragam forum bagi masyarakat untuk bersentuhan atau menjalin kontak dengan korban bencana dan instansi-instansi resmi, serta tindakan-tindakan heroik pekerja media yang berada di lokasi saat bencana terjadi (Minear, Scott dan Weiss, 1997: 43-95; Berry, Jones dan Power, 1999: 30-35; dan Ward dkk.,

2000: 18-36). Pada tahap paskabencana, bukan tidak mungkin muncul jenis media-media lain, semisal media luar ruang yang berisi *encouraging message* dan *shortcuts* kepedulian.



Gambar 2

Gambar 2
Posisi Keterlibatan Media

Suatu pertemuan ahli yang diselenggarakan dalam kaitannya dengan bencana menghasilkan beberapa temuan penting, yang bisa dipakai media untuk menempatkan diri dalam keterlibatannya dengan media. Disebutkan dalam pertemuan itu, pemberdayaan publik dan diseminasi peringatan dini

secara luas serta cepat pada dasarnya akan mampu menyelamatkan lebih banyak manusia.⁵ Pernyataan senada juga muncul dalam forum publik yang diselenggarakan the United Nations University dan the International Centre for Disaster Mitigation Engineering University of Tokyo tanggal 8 dan 9 Oktober 1998 tentang potensi media komunikasi dalam penyikapan bencana.⁶ Dengan kata lain dapat ditegaskan, media mampu berperan penting dalam pemberian informasi dini prabencana, saat kejadian dan paskabencana.

Jamaknya sebuah peristiwa, tentu akan muncul beberapa pihak yang merasa berkepentingan dengan peristiwa yang terjadi. Persoalan muncul ketika pihak yang melibatkan diri dalam peristiwa itu justru berusaha memanfaatkan suasana panik, bingung, tidak teratur dan tidak jelas. Hal ini biasa terjadi pada saat bencana berlangsung dengan munculnya tindak kejahatan, informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan justru mengeruhkan suasana. Pada situasi setelah bencana, pemanfaatan suasana akan semakin berkembang luas, baik dilakukan dengan kesengajaan tertentu atau justru muncul karena kondisi laten dan ketidakberdayaan masyarakat. Pada suasana seperti ini, media mestinya tak lagi sekadar menghadirkan reportase langsung dan kemungkinan informasi atas dasar realitas psikis, namun semestinya hadir dengan keakurasian informasi atas dasar realitas sosial.

Kejahatan kerap muncul karena kesadaran masyarakat “terganggu” oleh upaya penyelamatan diri dan pikiran untuk mempertahankan kehidupannya. Pencurian dan teror sebagai misal, terjadi dan merebak sesaat setelah gempa bumi di Yogyakarta 27 Mei 2006. Dalam kaitannya dengan kasus-kasus kejahatan seperti ini West (2006: 2) memaparkan temuan Tucker dan Norris tentang meningkatnya kejahatan domestik dan mengingatkan lebih jauh

⁵ Tentang pertemuan ini lihat <http://www.annenberg.northwestern.edu/pubs/disas/disas32.htm>

⁶ Lihat <http://www.unu.edu/media/archives/1998/pre20.98.html>

tentang kemungkinan terjadinya beragam bentuk kejahatan di seputar waktu terjadinya bencana. Dalam pendapat West masalah-masalah yang terkait dengan kejahatan-kejahatan di seputar bencana terjadi karena ketiadaan tempat sementara untuk melaporkan kejahatan, sistem pelaporan reguler yang lumpuh karena bencana, data dan bukti penting hilang, pelaku kejahatan cenderung pendatang atau orang asing, pemosisian bahwa keselamatan lebih utama daripada memikirkan kejahatan yang mungkin bisa menimpa korban, jalur komunikasi dan layanan hukum kurang dipersiapkan untuk reaksi cepat di seputar bencana dan kekurangsambungan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah serta lembaga terkait dalam hal koordinasi. Terhadap hal ini media relatif bisa berperan untuk menjadi penghubung cepat antarbagian dalam masyarakat serta antara masyarakat dan aparat pemerintah dan keamanan.

Pentingnya kebijakan, keakurasian serta *ke-proper-an* media dan pekerjaannya dalam menyajikan informasi bencana juga terasa paskabencana. Isu yang berkembang di lingkungan sekitar peristiwa bencana, ini bukan saja terjadi di Indonesia, muncul dan kerap dikaitkan dengan masalah mitos, mayat dan epidemi. Penghormatan terhadap mayat korban bencana, seperti diajarkan agama dan adat, memang telah banyak tertanam dan dilakukan. Namun demikian, seperti dinyatakan Goyet (2004: 297-299), dari masalah mayat ini kerap memunculkan ketakutan yang berujung pada ketidakefektifan penanganan bencana karena rasa takut yang tidak semestinya. Rasa takut pada hal-hal yang terkait dengan kematian tak wajar ini bukan tidak mungkin juga dimanfaatkan secara negatif oleh para pelaku kejahatan. Pada tataran ini media dapat menampilkan informasi yang lebih mengutamakan kesehatan dan menafikkan informasi yang hanya muncul karena mitos kematian tak wajar. Lebih praktis lagi, media mestinya tak berkilah kalau kecemasan masyarakat

adalah suatu realitas sosial yang layak diinformasikan karena informasi seperti ini lebih bersifat kontra produktif dalam penanganan bencana (Goyet, 2000: 171-172).

Reputasi media dan pekerjaannya dalam suatu bencana yang terjadi dapat dipandang dari dua sisi. Pertama, media dan pekerja media mampu menghadirkan informasi yang dibutuhkan publik, meskipun kebijakan redaksional dalam pewartaan bencana sesungguhnya dapat diarahkan ke hal-hal yang lebih memperbesar atensi publik pada korban bencana. Kedua, media berperan besar tak hanya dalam pewartaan bencana namun juga dalam aksi-aksi langsung penanganan bencana. Gambaran yang diberikan setelah terjangkit badai Katrina dan Rita di Amerika Serikat, sebagai contoh, menunjukkan capaian luar biasa new media dalam pengumpulan donasi untuk para korban. Sekitar 13 juta orang Amerika atau sekitar 9% pengguna internet di negara itu terlibat aktif dalam pengumpulan dana. Selain itu, sekitar 50% pemakai internet online untuk mendapatkan berita dan informasi lain, sekitar 24% saling berkiriman email dan pesan dan 9% menggunakan internet untuk mengecek keselamatan saudara dan sahabatnya.⁷ Sedangkan media konvensional dan para pekerjaannya kerap digambarkan berada dalam tim relawan untuk menyelamatkan korban bencana. Namun manajemen untuk relawan-relawan spontan dari kalangan media ini perlu dilakukan agar sinergi antara niat baik dan koordinasi bantuan dapat lebih meningkat hasilnya.⁸ Harus diakui, pekerja-pekerja media pun tak luput dari akibat bencana itu sendiri. Beberapa dari mereka dilaporkan ikut tewas atau hilang saat bencana terjadi dan bahkan saat berada dalam proses penyelamatan.

⁷ Lihat <http://www.nten.org/comment/reply/309>

⁸ Lihat <http://www.nvoad.org/managingspontaneousvol.pdf>

Penutup

Merupakan suatu keniscayaan apabila media berperan dalam persebaran informasi tentang bencana yang terjadi. Pelaksanaan fungsi komunikasi dengan sendirinya bertumpu pada kemampuan media dan pekerjaannya menyalurkan informasi yang dibutuhkan dan dianggap penting oleh publik. Namun demikian, tipisnya pagar batas media dan pekerjaannya dalam suatu bencana mau tidak mau menempatkan mereka tidak saja sekadar sebagai pelapor peristiwa, namun juga sebagai aktor dalam peristiwa, yang bisa menempatkan pekerja media sebagai saksi langsung bencana, korban, penyelamat korban dan upaya-upaya lain untuk meringankan penderitaan akibat bencana.

Tulisan di depan mencoba merangkai posisi kehadiran media dalam mewartakan bencana dan menggambarkan keterlibatannya dalam peristiwa bencana itu sendiri. Tanpa harus terjebak pada mimpi besar tentang sistem informasi bencana, keterlibatan media dapat dilihat dari posisinya sebagai pembawa informasi dan sebagai bagian dari suatu pengoperasian manajemen informasi bencana. Dengan landasan bahwa keselamatan, keamanan dan kesehatan umat manusia adalah hal yang utama, arah dari aksi dan keterlibatan media dalam membawakan peran pra, saat dan paskabencana adalah mengabdikan pada kemanusiaan dan kehidupan.

Namun demikian, tetaplah menjadi suatu hal yang harus dipertimbangkan bahwa informasi tentang bencana yang disajikan media tidak selamanya sesuai dengan kebutuhan dan keinginan publik. Di satu sisi memang, publik akan mendapat banyak manfaat dari peran dan keterlibatan media dalam penanganan bencana. Di sisi lain, tidak sedikit pula, *mis-information* dan disfungsi informasi yang berakibat menjadi bencana lain hanya karena media kurang bisa berperan maksimal. Dalam hal ini, pekerja dan

pengelola media pun kiranya perlu banyak belajar tentang bencana, manajemen informasi bencana dan fungsi dan disfungsi informasi yang disajikannya.*****

Daftar Pustaka

- Abott, Ernest B. (2003). *Draft Checklist for State and Local Government Attorneys to Prepare for Possible Disasters*. American Bar Association – State and Local Government Law Section
- ASIS International Disaster Management Council. (2003). *ASIS Disaster Preparation Guide*. USA: ASIS International.
- Berry, LaVerle; Amanda Jones dan Terence Powers. (1999). *Media Interaction with the Public in Emergency Situations: Four Case Studies*. Washington DC: Federal Research Division, Library of Congress.
- Cobb, Roger W. dan Davd M. Primo. (2003). *The Plane Truth: Airline Crashes, the Media and Transportation Policy*. Washington, DC: Brookings Institution Press.
- Cohl, H. Aaron. (1997). *Are We Scaring Ourselves to Death?: How Pessimism, Paranoia, and a Misguided Media are Leading Us Toward Disaster*. New York: St. Martin's Griffin.
- Goyet, Claude de Ville de. (2000). *Management of Dead Bodies in Disaster Situations*. Washington DC: PAHO dan WHO.
- Goyet, Claude de Ville de. (2004). "Epidemics Caused by Dead Bodies: a Disaster Myth that does not Want to Die. Editorial dalam *Public Health* 15(5), 2004. hal. 297-299.
- Heyer, Paul. (1995). *Titanic Legacy: Disaster as Media Event and Myth*. New York: Praeger Publisher.
- Light Foundation & Volunteer Center National Network. (2002). *Preventing a Disaster within the Disaster: The Effective Use and Management of Unaffiliated Volunteers*. Washington, DC: Points of Lights, UPS dan FEMA.
- Minear, Larry; Colin Scott dan Thomas Weiss. (1997). *The News Media and Humanitarian Action*. UNDP: Disaster Management Training Programme
- National Emergency Management Association. (2003). *If Disaster Strikes Today, Are You Ready to Lead?* Publikasi. Lexington, KY: the National Emergency Management Association.
- Neuzil, Mark dan William Kovarik. (2005). *Mass Media and Environmental Conflict: America's Green Crusades*. New York: Sage Publications, Inc.

- Park Jacqueline dan Janne Aagaard Jensen. (2005). *Shaking our Foundations: Media and the Asian Tsunami*. Tersip di www.ifj.org/pdfs/tsunamireport-final.pdf.
- Perl, Raphael. (2006). "Trends in Terrorism: 2006." Laporan Congressional Research Service. Tersip di: <http://fpc.state.gov/documents/organization/69749.pdf>
- Ross, Gina. (2003). *Beyond the Trauma Vortex: The Media's Role in Healing Fear, Terror, and Violence*. Berkeley, CA: North Atlantic Books.
- Simons, Gregory. (2004). "Russian Crisis Management Communications and Media Management under Putin". Makalah pada the Annual Scientific Meeting of the *International Society of Political Psychology* di Lund, Swedia. Juli 2004.
- UN/ISDR dan CRED. 2007. "2006 Disasters in Numbers". Tersip di: <http://www.unisdr.org/eng/media-room/press-release/2007/2006Disaster-in-number-CRED-ISDR.pdf>
- Ward, Peter; Rodney Becker, Don Bennett, Andrew Bruzewich, Bob Everett, Michael Freitas, Karl Kensinger, Frank Lucia, Josephine Malilay, John O'Connor, Elaine Padovani, John Porco, Ken Putkovich, Tim Putprush, Carl P. Staton, David Sturdivant, Jay Thietten, Bill Turnbull dan John Winston. (2000). *Effective Disaster Warnings*. The Working Group on Natural Disaster Information Systems, National Science and Technology Council, Committee on Environment and Natural Resources
- West, Helga. (2006). "Victims of Violence in Times of Disaster or Emergency." Makalah pada pertemuan pakar *After the Crisis: Healing from Trauma after Disaster* di Bethesda, 24-25 April 2006.
- Ward, Peter; Rodney Becker, Don Bennett, Andrew Bruzewich, Bob Everett, Michael Freitas, Karl Kensinger, Frank Lucia, Josephine Malilay, John O'Connor, Elaine Padovani, John Porco, Ken Putkovich, Tim Putprush, Carl P. Staton, David Sturdivant, Jay Thietten, Bill Turnbull dan John Winston. (2000). *Effective Disaster Warnings*. The Working Group on Natural Disaster Information Systems, National Science and Technology Council, Committee on Environment and Natural Resources

Situs

<http://www.annenberg.northwestern.edu/pubs/disas/disas32.htm>

<http://www.nten.org/comment/reply/309>

<http://www.nvoad.org/managingspontaneousvol.pdf>

<http://www.unu.edu/media/archives/1998/pre20.98.html>